



Article Informations
Corresponding Email:
sya06rhidayat@gmail.com

Received: 15/07/2025; Accepted:
20/09/2025; Published: 15/10/2025

MOTIF BANTUAN LUAR NEGERI KOREA SELATAN DALAM KERJASAMA KEAMANAN SIBER DENGAN INDONESIA TAHUN 2022-2024

Syarif Hidayatullah

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motif yang mendasari bantuan luar negeri Korea Selatan kepada Indonesia berupa hibah dan transfer teknologi dalam kerja sama keamanan siber, melalui Korea International Cooperation Agency (KOICA) yang berperan sebagai instrumen penyalur bantuan dana hibah yang mensponsori proyek kerja sama “Pembangunan Kapasitas Investigasi Kejahatan Siber Untuk Kepolisian Republik Indonesia” tahun 2022-2024. Melalui paradigma neorealisme dan konsep motif bantuan luar negeri dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengidentifikasi bantuan luar negeri untuk kerja sama keamanan siber dengan Indonesia bersifat multidimensional dan tidak semata-mata didorong oleh altruisme melainkan adanya motif ekonomi, Korea Selatan berupaya untuk meningkatkan akses sumber daya dan ekonomi digital. Secara politik digunakan sebagai strategi untuk memperkuat posisi strategisnya di Asia Tenggara dan Korea Selatan sebagai negara yang berkontribusi aktif dalam pembangunan global, termasuk dalam peningkatan kapasitas keamanan siber Indonesia. Serta motif Keamanan Nasional sebagai perlindungan infrastruktur kritis Korea Selatan dari ancaman siber.

Kata Kunci: Korea Selatan, Motif Bantuan Luar Negeri, Korea International Cooperation Agency (KOICA), Indonesia, Keamanan Siber.

Abstract

This study aims to analyze the motives underlying South Korea's foreign aid to Indonesia in the form of grants and technology transfers in cybersecurity cooperation, through the Korea International Cooperation Agency (KOICA), which acts as an instrument for channeling grant funds that sponsor the 2022-2024 cooperation project “Capacity Building for Cybercrime Investigation for the Indonesian National Police.” Using the neorealist paradigm and the concept of foreign aid motives with a descriptive qualitative approach, this study identifies that foreign aid for cybersecurity cooperation with Indonesia is multidimensional and not solely driven by altruism, but also by economic motives, as South Korea seeks to increase access to digital resources and the digital economy. Politically, it is used as a strategy to strengthen its strategic position in Southeast Asia, and South Korea as a country actively contributing to global development, including in enhancing Indonesia's cyber security capacity. Additionally,

national security motives aim to protect South Korea's critical infrastructure from cyber threats.

Keywords: *South Korea, Foreign Aid Motives, Korea International Cooperation Agency (KOICA), Indonesia, Cybersecurity.*

1. PENDAHULUAN

Sejak berakhirnya Perang Dunia II, bantuan luar negeri telah menjadi instrumen krusial dalam lanskap diplomasi internasional. Diawali oleh Marshall Plan pada tahun 1947, bantuan yang diprakarsai Amerika Serikat untuk membangun kembali Eropa yang hancur pasca-perang telah membentuk pandangan bahwa bantuan luar negeri merupakan alat strategis untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dengan harapan menciptakan stabilitas yang berkontribusi pada perdamaian dan kemakmuran global (Kim S. , 2016). Di samping tujuan pembangunan ekonomi, sosial, dan politik negara penerima, bantuan luar negeri juga merefleksikan upaya kolektif untuk mengatasi isu-isu global yang kompleks, menandakan adanya hubungan interdependensi antarnegara yang saling menguntungkan dan memainkan peran penting sebagai sumber modal bagi negara-negara berkembang (Joseph Nye, 1973). Sehingga bantuan luar negeri telah memainkan peran penting di negara-negara berkembang sebagai sumber modal.

Namun, di balik narasi idealis tersebut, tujuan kemanusiaan melalui bantuan luar negeri sering kali dipertanyakan. Adanya variasi yang tidak proporsional antara tingkat kebutuhan negara penerima dan jumlah bantuan yang diberikan, serta pengaruh dominan negara donor terhadap kinerja bantuan, menjadikan bantuan luar negeri sebagai instrumen yang kompleks dan kontroversial dalam hubungan internasional (Sogge, 2002). Praktik menunjukkan bahwa bantuan luar negeri kerap kali lebih mencerminkan kepentingan politik dan ekonomi negara donor daripada kebutuhan riil negara penerima.

Seperti sisi lain bantuan luar negeri Marshall Plan dari AS pada era Perang Dingin ketika persaingan ideologi antara blok kapitalis dan komunis,

diindikasikan mengandung kepentingan politik untuk membendung penyebaran komunisme di Eropa yang hancur akibat perang (Benn, 2019). Bahkan, di negara-negara bekas Uni Soviet, bantuan yang diberikan justru dinilai memperburuk kemiskinan dan ketidakstabilan politik, menunjukkan bahwa bantuan luar negeri tidak selalu memberikan manfaat signifikan. Selain itu, fenomena tersebut mencerminkan ketidakseimbangan kekuasaan dalam sistem internasional, melalui negara donor yang memiliki kendali besar atas alokasi, implementasi, dan pengawasan bantuan yang menciptakan situasi hubungan asimetris yang secara tidak langsung memperkuat dominasi negara donor sekaligus melemahkan kedaulatan negara penerima (Lancaster, 2007).

Pada abad ke-21 ini, *Official Development Assistance* (ODA) adalah standar utama bantuan luar negeri. Korea Selatan sebagai negara *middle power* dan anggota Komite Bantuan Pembangunan (DAC) di *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) pada tahun 2010, telah mengisyaratkan bahwa mereka akan aktif memberikan bantuan luar negeri untuk pembangunan kepada negara-negara berkembang. Berbekal pengalamannya sebagai penerima bantuan pasca-penjajahan dan Perang Korea, Korea Selatan mengklaim akan memberikan bantuan dari sudut pandang penerima. KOICA (Korea International Cooperation Agency), salah satu agen ODA Korea Selatan fokus pada pembangunan sosial-ekonomi melalui hibah, di antaranya dengan Indonesia sebagai salah satu mitra inti. KOICA dan Indonesia memiliki berbagai kerja sama, termasuk salah satunya bantuan hibah sebesar dan transfer teknologi pada proyek "Pembangunan Kapasitas Investigasi Kejahatan Siber untuk Kepolisian Republik Indonesia" (2018-2024). Kerja sama ini sangat relevan mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi internet terbesar keempat di dunia (212,9 juta) dan menghadapi peningkatan tajam ancaman siber pada tahun 2020 (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 2020). Data BSSN menunjukkan ratusan juta serangan siber setiap tahunnya, menjadikan keamanan siber sebagai prioritas nasional. KOICA menyalurkan dana

signifikan untuk proyek ini, menunjukkan keselarasan dengan kebutuhan Indonesia.

Meskipun Korea Selatan menegaskan bantuannya berdasar kebutuhan kemanusiaan, realitas bahwa bantuan luar negeri tidak sepenuhnya altruistik melainkan memiliki beberapa determinan. Korea Selatan cenderung memberikan ODA kepada negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi strategis yang menguntungkan sebagai target ekspor, negara yang memiliki SDA atau komoditas yang dibutuhkan, dan investasi Korea Selatan (Kim & Jinhwan, 2012). Atas dasar tersebut penelitian ini dilakukan untuk menganalisa motif apa di balik bantuan luar negeri Korea Selatan dalam kerja sama keamanan siber dengan Indonesia pada tahun 2022-2024.

2. PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil penelitian yang dibagi ke dalam beberapa bagian. Hasil penelitian dapat dilengkapi dengan tabel, grafik (gambar), dan / atau bagan. Bagian pembahasan memaparkan hasil analisa penulis mengenai isu yang diangkat, interpretasi mengenai penemuan secara logis, mengaitkan dengan sumber rujukan yang relevan. Pengutipan menggunakan *running-notes/ text-notes/ body-notes*. [Bookman Old Style 12, ditulis normal dengan spasi 1,5].

Dalam menganalisa motif bantuan luar negeri Korea Selatan dalam kerja sama keamanan siber dengan Indonesia, penulis merujuk pada pendapat Robert Gilpin dalam "*The Political Economy of International Relations*" yang melihat bahwa motif bantuan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh motif dimensi ekonomi, politik, dan keamanan nasional yang tidak harus berdampak secara kontan pada kepentingan negara donor (Gilpin, 1987). Determinan tersebut relevan dengan penelitian "*What Matters in Determining Korean ODA Allocation: An Empirical Analysis of Bilateral Aid since 1991*" oleh Hyuk-Sang Sohn yang berpendapat bahwa determinan alokasi hibah Korea Selatan memiliki empat kategori utama, yakni ekonomi, politiko-strategis, kultural atau interaktif dan humanitarian (Sohn H.-S. , Ahn, Kyung, & Hong, 2011).

A. Ekonomi

Determinan ODA Korea Selatan secara umum adalah memfasilitasi hubungan perdagangan dengan negara penerima sehingga dapat mengakses sumber daya alam dan akses pasar bagi perusahaan Korea Selatan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi asing dan kerja sama ekonomi jangka panjang (Sohn, Ahn, & Kyung, *What Matters in Determining Korean ODA Allocation: An Empirical Analysis of Bilateral Aid since 1991*, 2011). Negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi lebih kuat dengan Korea cenderung menerima ODA lebih besar, meskipun terdapat komitmen kebijakan untuk membantu negara-negara miskin, namun data menunjukkan bahwa alokasi bantuan lebih condong ke negara-negara dengan pendapatan menengah, seperti Vietnam, Filipina dan Indonesia, yang memiliki potensi pasar besar bagi Korea Selatan (Kim S. , 2016).

1. Akses Sumber Bahan Bakar dan Minyak Mineral

Pada dasarnya, komoditas kategori bahan bakar mineral, minyak mineral dan produk penyulingannya merupakan produk yang terbesar diimpor Korea Selatan dari seluruh perdagangan dengan negara-negara lain. Dengan persentase 28.6% tahun 2022, terdiri dari minyak bumi mentah, gas alam, briket batu bara, minyak bumi olahan, bijih besi, bijih tembaga dan lain-lain. Selain itu, disusul dengan mesin elektrik dan barang elektronik (17.4%), mesin, peralatan mekanik dan suku cadang (9.56%) (OEC, 2023). Kebutuhan akan sumber bahan bakar mineral disebabkan sumber daya mineral Korea Selatan yang terbatas, hanya memiliki cadangan utama berupa batu bara antrasit, bijih besi, grafit, emas, perak, tungsten, timbal, dan seng (Britannica, 2025).

Indonesia adalah mitra perdagangan Korea Selatan yang menyuplai komoditas bahan bakar mineral, minyak mineral dan produk penyulingannya terbesar di Asia Tenggara, di antara negara-negara mitra KOICA, dan ke-9 di dunia pada tahun 2022. Korea Selatan mengimpor bahan bakar dan minyak mineral (42.9%) sebagai kategori tertinggi dalam

perdagangan bilateral, terdiri dari batu bara briket (22.2%) (terbesar ke-3 setelah Australia dan Rusia), gas alam (19%) (terbesar ke-6 dari negara-negara lain), bijih tembaga (8.8%), minyak bumi olahan (1.3%), lignit (0.62%), minyak bumi mentah (0.11%), dan lain-lain (OEC, 2023).

Sehingga, secara tidak langsung ODA KOICA cenderung berperan sebagai instrumen yang mempererat hubungan bilateral dan perdagangan dengan Indonesia sebagai elemen pelengkap dari perjanjian kerja sama perdagangan yang inklusif, di antaranya adalah *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreements (IK-CEPA)* yang resmi diimplementasikan pada tahun 2023. Perjanjian ini bertujuan untuk menghapus tarif untuk 92% pos tarif Indonesia. (Saung Korea, 2023) Dengan perpaduan perjanjian kerja sama perdagangan non-tarif dan ODA sebagai kebijakan luar negeri, menjadikan Korea Selatan mitra strategis tujuan ekspor bahan bakar dan minyak mineral Indonesia, seperti batu bara, gas alam, bijih tembaga, minyak bumi mentah, dan lain-lain. (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022)

Hal tersebut merujuk pada dasarnya bantuan luar negeri dapat digunakan sebagai "pelumas" untuk memfasilitasi kesepakatan pertambangan, eksplorasi, ekstraksi, atau perdagangan, untuk mengamankan sumber daya, bahkan sebelum eksploitasi penuh dimulai (Arezki, Camara, Ploeg, Rota-Graziosi, & Ploeg, 2024). Seperti halnya upaya Presiden Yoon Suk Yeol sebagai tuan rumah pada KTT bersama sekitar 48 pemimpin negara Afrika dengan rencana bantuan untuk infrastruktur industri dan transformasi digital dengan meningkatkan bantuan pembangunan untuk Afrika menjadi 10 miliar USD dalam enam tahun ke depan, beriringan dengan upaya pemanfaatan sumber daya mineral tersebut dilakukan dengan memperdalam kerja sama perdagangan dan "*The Korea-Africa Critical minerals dialogue*" yang bertujuan untuk pengembangan berkelanjutan sumber daya alam Afrika dan menjadi rantai pasokan yang stabil dan menguntungkan yang memiliki 30% dari mineral kritis dunia termasuk krom, kobalt, dan

mangan, sangat krusial bagi Korea Selatan sebagai dasar bagi perdagangan dan investasi yang akan membantu menetapkan landasan administratif untuk perdagangan yang lebih bebas dan pengelolaan bea cukai yang lebih canggih. (Reuters, 2024)

2. Ekonomi Digital

Indonesia berpotensi menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di ASEAN tahun 2025 yang kini terus mengalami pertumbuhan hingga USD 146 Miliar (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2023). Prediksi tersebut relevan dengan laporan *e-Conomy SEA 2020*, bahwa ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai nilai sebesar USD 124 miliar pada tahun 2025 (Google; Temasek; Bain & Company, 2020). Korea Selatan adalah salah satu negara yang memiliki strategi pembangunan nasional untuk melakukan percepatan ekonomi pasca COVID-19, yang bernama *Korean New Deal*, dan salah satu pilarnya adalah *Digital New Deal*. Singkatnya, *digital new deal* adalah strategi investasi dan kebijakan yang dirancang untuk membangun fondasi digital yang kuat serta memanfaatkan teknologi untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi di berbagai sektor ekonomi dan masyarakat. Dengan fokus utama dari strategi ini adalah Pembangunan Ekosistem D.N.A (Data, Network, AI). (Ministry of Science and ICT, 2025)

Meskipun berfokus pada investasi domestik dalam infrastruktur Data, Jaringan, dan AI (D.N.A.) serta digitalisasi sektor-sektor utama, *Digital New Deal* juga bagian kerangka untuk menjadi "*leading nation*" secara global, teknologi, inovasi, dan model bisnis Korea Selatan perlu diakui dan diadopsi di pasar internasional. Kemajuan ekonomi digital tersebut merupakan peluang dimensi ekonomi, dan menjadi pemimpin digital bagi Korea Selatan sebagai salah satu negara unggulan dalam teknologi digital global dan basis bagi perusahaan-perusahaan digital ternama seperti Samsung, SK, LG, dan Naver dalam perdagangan bilateral ataupun investasi (Departement Of Commerce USA, 2024). Selain itu komoditas utama yang di ekspor Korea Selatan pada tahun 2022-2023 adalah

integrated Chip (IC) sebesar 20,6% hingga 20,9% dengan nilai perdagangan 134 hingga USD 159 Miliar (OEC, 2023). Pemanfaatan tersebut terlihat pada masuknya investasi dari perusahaan sektor TI Korea Selatan ke Indonesia yang menunjukkan tren yang positif seiring perkembangan ekonomi digital Indonesia. Terlihat dari investasi dari LG CNS kepada Sinar Mas Group melalui *joint venture* di sektor layanan konsultasi manajemen *data center* berbasis AI dan ICT dengan nilai Rp 4,6 triliun dengan enam pilar strategis, yaitu *data center and cloud services, finance services, public and smart solutions, smart factory, telekomunikasi, serta global delivery center*. *Venture capital* Korea Selatan, seperti *East Ventures*, turut mengalir ke berbagai sektor di Indonesia.

Program ini tidak hanya meningkatkan ketahanan nasional Indonesia, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas regional di tengah meningkatnya ancaman siber yang memberikan keunggulan kompetitif bagi Korea Selatan dalam menjalin kemitraan dengan Indonesia pada konteks *transfer of technology* dan secara tidak langsung melindungi investasi dan bisnisnya di kawasan ini. Selain itu, bantuan KOICA dalam pembangunan kapasitas investigasi kejahatan siber bagi Polri berperan memperkuat reputasi teknologi dan keunggulan mereka dalam bidang keamanan siber yang membuka peluang serta memperluas jangkauan ekosistem D.N.A, peluang pasar baru bagi perusahaan keamanan siber Korea Selatan.

B. Politik

Menurut perspektif Gilpin, negara berperilaku untuk memaksimalkan kekuatan relatif dan meningkatkan posisi serta pengaruhnya di sistem internasional meskipun dalam memberikan bantuan luar negeri untuk menunjukkan otoritas dan kekuatan, serta meningkatkan statusnya sebagai negara unggul dalam sektor-sektor penting, seperti politik. Di mana bantuan tidak hanya bersifat altruistik tetapi juga strategis. Hal tersebut bagian dari *Middle Power* strategi, instrumen memperluas pengaruh tanpa konfrontasi militer dan ekonomi. Walaupun bantuan luar negeri yang diberikan kepada

negara yang asimetris namun tetap memberikan dampak secara jangka panjang.

1. Menjaga Posisi Strategis Korea Selatan di Sistem Internasional

“*Middle Power Diplomacy*” sering digunakan Korea Selatan dalam menentukan peran dan kebijakan di tengah dinamika global yang terus berubah untuk meninggalkan fokus pada kepentingan jangka pendek seputar Semenanjung Korea dan kemitraan dengan AS menjadi fokus pendekatan multilateral baru di tingkat regional maupun global (Sohn Y. , *South Korea's Drive for Middle-Power Influence*, 2016). Didasari seiring bertambahnya sumber daya dan kemampuan Korea Selatan diharapkan kebijakan luar negeri yang lebih proaktif dan sejalan dengan kapasitasnya. Seperti halnya, *technology prestige* Korea Selatan sebagai peringkat ke-10 dari 132 negara dalam kemampuan inovasi, hasil inovasi (*innovation outputs*) di peringkat ke-7, input inovasi (*innovation inputs*) di peringkat ke-12, dan Korea Selatan unggul dalam indikator *high-tech exports* di peringkat ke-6 dengan total ekspor sebesar \$204,99 miliar pada tahun 2021 (Global Innovation Index (GII), 2023).

Dalam turut keterlibatannya pada isu-isu global seperti keamanan siber, terutama keterlibatan tersebut melalui lembaga KOICA sebagai agensi yang memberikan hibah untuk kerja sama pembangunan, membuka banyak peluang untuk menjaga kekuatan di sistem internasional. Hal tersebut selaras dengan kebijakan *Korea-ASEAN Solidarity Initiative* (KASI) di bawah Presiden Yoon Suk-yeol yang merupakan inisiatif yang berfokus secara khusus pada peningkatan kerja sama dengan negara-negara ASEAN dengan penekanan pada aspek ekonomi melalui peningkatan investasi dan ekspor, keamanan, pertukaran teknologi, dan inovasi digital, yang sejalan dengan tujuan untuk memperkuat peran Korea Selatan di kawasan Asia Tenggara (Tan, 2024). Terutama, proyek *Korea-ASEAN Digital Innovation Flagship* (KADIF) melalui siaran pers *Ministry of Science ICT* Korea Selatan dipaparkan proyek ini sebagai implementasi dari kebijakan KASI melalui peningkatan infrastruktur digital, pengembangan

ekosistem data dan AI, serta peningkatan kapasitas digital di kawasan dengan nilai investasi USD 30 juta selama 5 tahun (Ministry of Science and ICT of South Korea, 2023).

Indonesia, sebagai salah satu kekuatan utama di ASEAN dan negara dengan lokasi strategis di jalur perdagangan Indo-Pasifik, memainkan peran kunci dalam strategi tersebut. Korea Selatan mendukung penguatan kapasitas keamanan di kawasan melalui bantuan teknis dan transfer teknologi, salah satunya dengan program pembangunan kapasitas forensik kejahatan siber yang dilaksanakan oleh KOICA atas permintaan Polri dan ITB selama 2018–2024 (KOICA, 2022). Dalam konteks geopolitik, kerja sama ini memungkinkan Korea Selatan untuk memperluas pengaruh geopolitiknya di ASEAN, sehingga mengurangi dominasi negara-negara pesaing seperti China.

Bantuan untuk keamanan siber Korea Selatan juga menciptakan ketergantungan Indonesia yang menguntungkan Korea Selatan dalam mengamankan rantai pasok pasar jangka panjang dan juga meningkatkan kekuatan relatif sebagai posisi *rule-maker* dalam standar keamanan siber regional sebagai alternatif dari ketergantungan pada teknologi China. Ketergantungan ini tercermin pada proyek pembangunan kapasitas investigasi kejahatan siber untuk Polri bersama ITB untuk memberikan pelatihan-pelatihan terkait pemanfaatan teknologi dan digital forensik dan karena memiliki pusat pelatihan siber forensik dalam pusat keamanan siber *R&D Center* di Jatinangor yang dibangun oleh KOICA untuk mengembangkan lingkungan pendidikan investigasi forensik siber dan menyediakan peralatan dan materi.

2. Mitra Strategis Penyedia Bantuan Pembangunan

Bantuan luar negeri (ODA) melalui KOICA berperan sebagai salah satu instrumen strategis perpanjangan tangan Korea Selatan dalam memperkuat kekuatan politiknya, status dan prestise dalam lingkungan internasional yang anarkis agar dapat meningkatkan legitimasi

internasional yang berimplikasi membuatnya lebih menarik sebagai mitra kerja sama, tujuan investasi, dan pusat diplomasi. Negara yang dipandang penting adalah Korea Selatan yang memiliki akses lebih mudah ke sumber daya global. Seperti kontribusi Korea Selatan di agenda dan isu-isu global, terutama sebagai keanggotaannya dalam *Development Assistance Committee* (DAC) di OECD. Metode tersebut umum digunakan oleh negara *middle power*, yang tidak memiliki kekuatan militer, ekonomi, dan sumber daya alam sebesar negara-negara besar, namun berkebutuhan untuk tetap bertahan dalam sistem internasional yang anarkis ini untuk tetap mendapatkan keamanan, dan ekonomi, sehingga secara rasional Korea Selatan memainkan peran strategis melalui diplomasi dan kerja sama dalam mengerahkan visi, pengalaman dan sumber daya manusianya secara efektif (Snyder & Bradford, 2015).

Setiap tahun, Korea Selatan meningkatkan rencana anggarannya untuk ODA dengan fokus yang berbeda-beda tergantung pada situasi internasional. Seperti pada tahun 2022, meningkatkan ODA menjadi 4,0 triliun won untuk mendukung partisipasi perusahaan Korea dalam proyek-proyek yang relevan, dan meningkatkan anggaran urusan luar negeri dan reunifikasi menjadi 6,0 triliun won (Ministry of Economy and Finance Republic of Korea (ROK), 2021). Bahkan secara tertulis dalam dokumen *Ministry of Economy and Finance Republic of Korea* dalam siaran pers rencana anggaran 2023 dalam sub poin "*Improvement of international safety and security as well as international status*" Korea Selatan menyebutkan akan meningkatkan ODA sebesar 14.2%, dari 3.9 Triliun Won menjadi 4.5 Triliun Won untuk meningkatkan status politik dan salah satunya ditujukan untuk memenangkan tawaran menjadi tuan rumah World Expo 2030.

Raise international status

- Increase the budget spent for ODA by 14.2 percent to 4.5 trillion won from the current 3.9 trillion won by expanding humanitarian aid to help Ukraine and address the global food crisis, contribution to global healthcare improvement, and small scale grant assistance that is aimed at winning the bid to host the World Expo 2030

Sumber : Ministry of Economy and Finance Republic of Korea

Pemerintah Korea Selatan secara terbuka menargetkan peningkatan peran sebagai donor global. Dalam strategi Indo-Pasifik terbarunya, Seoul menyatakan ambisinya menambah volume bantuan luar negerinya hingga menembus jajaran “10 besar” donor dunia (Hill, 2023). Melalui KOICA, Korea memproyeksikan citra dirinya sebagai kekuatan teknologi maju dan mitra pembangunan yang terpercaya (KOICA, 2021). Pemberian bantuan teknis di bidang keamanan siber tidak sekedar tindakan altruistik, melainkan sinyal diplomatik yang memperkuat reputasi nasional serta memperluas pengaruh Korea di kawasan Asia Tenggara.

C. Keamanan Nasional

Serangan siber yang meningkat di Indonesia tidak hanya menjadi masalah domestik, tetapi juga berdampak langsung dan tidak langsung terhadap Korea Selatan, terutama karena hubungan ekonomi dan teknologi yang erat antara kedua negara. Menurut Gilpin, keamanan nasional termasuk dalam motif bantuan luar negeri dan selaras dengan pendapat Stephen Walt terkait negara yang bergabung atau beraliansi untuk melawan suatu entitas atau masalah yang sama, yakni ancaman siber yang mengancam kedua pihak.

1. Perlindungan infrastruktur kritis Korea Selatan dari ancaman siber

Transformasi digital Indonesia yang cepat menghadirkan peluang dan tantangan. Peluang potensi Indonesia menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di ASEAN tahun 2025 hingga USD 146 Miliar dan

tantangannya tidak meratanya infrastruktur digital, kekurangan tenaga ahli keamanan siber yang terampil, kebijakan dan ketimpangan literasi digital antar wilayah menyebabkan kelemahan tonggak dalam pembangunan ekonomi digital, khususnya pada berkembangnya kompleksitas dan skala ancaman siber. Insiden siber terbaru seperti pada Juni 2024, serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya mengganggu layanan di berbagai lembaga pemerintah, termasuk sistem imigrasi dan platform pendaftaran mahasiswa online menggunakan ransomware LockBit 3.0, insiden ini menyoroti celah signifikan dalam sistem cadangan data dan protokol keamanan siber Indonesia yang perlu diperbaiki.

Di antara upaya mitigasi kejadian tersebut adalah dengan membangun kerja sama keamanan siber, salah satunya pembangunan kapasitas investigasi kejahatan siber untuk Polri melalui KOICA sebagai bentuk kerja sama keamanan siber lainnya seperti Korea Internet and Security Agency (KISA) untuk kawasan Asia Tenggara yang telah dimulai sejak 2016. Inisiatif dikarenakan Indonesia salah satu mitra dagang penting bagi Korea Selatan, selain infrastruktur Indonesia, potensi serangan siber menasar perusahaan-perusahaan, perusahaan yang menampung investasi Korea Selatan pun cukup besar, sementara serangan siber yang menasar dua negara pun terus meningkat. Sehingga meningkatkan keamanan siber di Indonesia dan negara ASEAN lainnya menjadi perhatian penting menurut Direktur Utama Kantor Perwakilan KISA Kawasan Asia Tenggara KwonHyuno (Kompas.id, 2025). Keamanan siber yang lebih kuat di Indonesia secara langsung menguntungkan perusahaan-perusahaan Korea Selatan yang berinvestasi di Indonesia, terutama di sektor ekonomi digital, yang bergantung pada keamanan data dan jaringan dari potensi gangguan siber.

3. KESIMPULAN

Kerja sama tersebut juga menunjukkan bagaimana neorealisme memandang hubungan internasional sebagai ajang untuk memaksimalkan keuntungan strategis. Bantuan luar negeri, dalam perspektif ini, tidak hanya didasari motif oleh altruistik, tetapi juga oleh kalkulasi realistis untuk memperoleh akses terhadap sumber daya, pasar, dan pengaruh politik. Dengan demikian, pendekatan Korea Selatan terhadap bantuan luar negeri dalam kerja sama keamanan siber dengan Indonesia adalah strategi yang kompleks, menggabungkan kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan nasional demi mencapai *survival* dan posisi yang lebih kompetitif dalam sistem internasional yang dinamis.

REFERENSI

- Arezki, R., Camara, Y., Ploeg, F. (., Rota-Graziosi, G., & Ploeg, R. v. (2024). Bad Samaritans in Foreign Aid: Evidence from Major Mineral Discoveries.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2020). *Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet di Indonesia*.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2022). *Ekspor Gas Alam Menurut Negara Tujuan Utama, 2000-2023*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTAxMyMx/ekspor-gas-alam-menurut-negara-tujuan-utama--2000-2023.html>.
- Benn, S. (2019). *The Marshall Plan : Dawn of the Cold War*. Council on Foreign Relations,.
- Brautigam, D. (2009). *The Dragon's Gift: The Real Story of China in Africa*.
- Britannica. (2025). *South Korea - Farming, Forestry, Fishing*. Retrieved from Britannica.
- BSSN. (n.d.).
- BSSN. (2021). *Statistik Keamanan Siber 2020*.
- Departement Of Commerce USA. (2024). *South Korea - Country Commercial Guide*. Retrieved from <https://www-trade-gov.translate.goog/country->

commercial-guides/korea-digital-economy?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge.

Gilpin, R. (1987). *The Political Economy of International Relations*. Princeton University Press.

Global Innovation Index (GII). (2023). *Global Innovation Index 2023 Republic of Korea*. Global Innovation Index. Retrieved from <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2023>.

Google; Temasek; Bain & Company. (2020). *At Full Velocity: Resilient and Racing Ahead*. Retrieved from E-Conomy SEA 2020: <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.

Hill, C. (2023). *Aiming for the Top Ten: Korea's Aid*. Retrieved from Devpolicy Blog from the Development Policy Centre: <https://devpolicy.org/aiming-for-the-top-ten-koreas-aid-20230601/>.

Joseph Nye, R. K. (1973). *Power and Interdependence*. Survival.

Kementerian Komunikasi Dan Digital. (n.d.). *Startup Digital*. Retrieved from <https://www.komdigi.go.id/transformasi-digital/ekonomi-digital/detail/startup-digital>.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2023). *Terbesar Di Asia Tenggara, Potensi Ekonomi Digital Indonesia Pada 2025 Capai USD 146 Miliar*. Retrieved from Kemendag: <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/terbesar-di-asia-tenggara-potensi-ekonomi-digital-indonesia-pada-2025-capai-usd-146-Miliar>

Kim, E. M., & Jinhwan, O. (2012). Determinants of Foreign Aid: The Case of South Korea. *Journal of East Asian Studies*.

Kim, S. (2016). Trends and the Determinants of Korea's Official Development Aid (ODA) Allocation.

KOICA. (2021). *KOICA Annual Report 2021*. Korea International Cooperation Agency (KOICA). Retrieved from <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.

KOICA. (2022). *KOICA Annual Report 2022*.

Kompas.id. (2025). *Korsel Terus Kembangkan Diplomasi Siber Di Indonesia*. Retrieved from <https://www.kompas.id/artikel/amankan-mitra->

dagang-penting-korsel-terus-kembangkan-diplomasi-siber-di-indonesia.

Lancaster, C. (2007). *Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics*. : University of Chicago Press.

Ministry of Economy and Finance Republic of Korea (ROK). (2021). *2022 Budget Drawn Up To Help Make Strong Leap Forward Beyond Riding Out Pandemic*.

Nye, R. K. (n.d.).

OECD. (2023). *South Korea (KOR) Exports, Imports, and Trade Partners*. Retrieved from The Observatory of Economic Complexity.

Priyandita, G., Kley, e. H., & De, D. V. (2022). *Lokalisasi Dan Keberhasilan Teknologi China di Indonesia* . Retrieved from Carnegie Endowment for International Peace: <https://carnegieendowment.org>

Reuters. (2024, June). *South Korea, Africa Leaders Pledge Deeper Ties, Critical Mineral Development*. Retrieved from <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/south-koreas-yoon-calls-greater-cooperation-with-africa-minerals-trade-2024-06-04>

Saung Korea. (2023). *IK-CEPA: Manfaat Bagi Indonesia Dan Korsel*. Retrieved from <https://saungkorea.com/ik-cepa-manfaat-bagi-indonesia-dan-korsel/>.

Siregar, A. (2024). *Daftar Startup Yang Dapat Pendanaan East Ventures Paruh Awal 2024*. Retrieved from IDN Times: <https://www.idntimes.com/business/economy/ananta-fitri/daftar-startup-yang-dapat-suntikan-east-ventures-di-paruh-awal-2024?page=all>.

Snyder, S. A., & Bradford, C. I. (2015). *Middle-Power Korea: Contributions to the Global Agenda*. Council on Foreign Relations Press. Retrieved from <https://www.cfr.org/report/middle-power-korea>

Sogge, D. (2002). *Give and Take: What's the Matter with Foreign Aid?* London: Zed Books,.

Sohn, H.-S., Ahn, S., & Kyung, J. H. (2011). What Matters in Determining Korean ODA Allocation: An Empirical Analysis of Bilateral Aid since 1991. *Korean Political Science Review*.

- Sohn, H.-S., Ahn, S., Kyung, & Hong, J. (2011). What Matters in Determining Korean ODA Allocation: An Empirical Analysis of Bilateral Aid since 1991. *Korean Political Science Review*.
- Sohn, Y. (2016). South Korea's Drive for Middle-Power Influence. *Global Asia*, vol. 11, no. 1. Retrieved from https://www.globalasia.org/v11no1/cover/south-koreas-drive-for-middle-power-influence_yul-sohn.
- Sohn, Y. (n.d.). South Korea's Drive for Middle-Power Influence. *Global Asia*.
- Tan, E. (2024). *South Korea-Southeast Asia Ties from Moon to Yoon: What Has Changed and What Has Stayed the Same?* Retrieved from <https://fulcrum.sg/south-korea-southeast-asia-ties-from-moon-to-yoon-what-has-changed-and-what-has-stayed-the-same/>.